

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.

- Penasehat** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Pengarah** : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
2. Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
3. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM
- Ketua Dewan Redaksi (Editor)** : Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
- Anggota Dewan Redaksi (Section Editor)** : 1. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
2. Nizar Apriansyah, S.E., M.H.
3. Edward James Sinaga, S.Si., M.H.
4. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si.
5. Ahmad Jazuli, S. Ag., M.H.
6. Imam Lukito, S.T., M.H.
- Redaksi Pelaksana** : 1. Fitriyani, S.H., M.Si.
2. Jaya Laksana, S.E.
- Sekretariat** : 1. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
2. Asmadi, S.H.
- Tata Usaha** : Suwartono
- Desain Grafis dan Teknologi Informasi** : 1. Machyudhie, S.T.
2. Risma Sari, S.Kom
3. Saefullah, S.ST, M.Si
4. Agus Priyatna, S.Kom
- Alih Bahasa** : Harry Fonte Sugiarto
(*Interlingua Translation Centre*)

Alamat Redaksi:

Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Fax. 021-2522954

balitbangkumham@gmail.com
ejournalkebijakan@gmail.com
jurnalkebijakan@balitbangham.go.id

HALAMAN KOSONG

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN (*ARTICLES*)

1. Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan Secara Elektronik.....227 - 241
Nizar Apriansyah
2. Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten dalam Rangka Peningkatan
Pelayanan Publik.....243 - 257
Ahmad Jazuli
3. Peran Ganda Administrator sebagai Mediator dalam Sengketa Transaksi
Ponsel Bekas Secara Online.....259 - 274
Aan Aswari
4. Peran Intelijen Keimigrasian dalam Rangka Antisipasi terhadap Potensi Kerawanan
yang ditimbulkan oleh Orang Asing di Wilayah Indonesia.....275 - 293
Trisapto Wahyudi Agung Nugroho
5. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka
dalam Proses Asimilasi Narapidana.....295 - 311
Haryono
6. Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis
(Studi pada Provinsi Kepulauan Riau)313 - 330
Imam Lukito

TINJAUAN HUKUM (*REVIEW*)

7. Kebijakan Kredit yang Dihapusbukukan atau Dihapus Tagih oleh Bank
BUMN Dalam Perspektif Kepastian Hukum 331 - 348
Sudjana

HALAMAN KOSONG

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui para pembacanya. Salawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkaraan suatu penerbitan jurnal ilmiah di berbagai lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Pada terbitan Volume 12 Nomor 3 Bulan November 2018 ini, kami memuat hasil-hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia, diantaranya di bidang Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Pemasyarakatan, Hukum dan Peradilan, serta Keimigrasian yang terbit kali ini. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi serta melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang masuk dapat dimuat pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum terbitan ini. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan, sehingga mutu dan kualitas tulisan tetap terjaga sesuai analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM serta dari Institusi / Akademisi dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh penulis yang telah berkenan menyumbangkan artikel/tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami pun terbuka dalam menerima kritik dan saran konstruktif sebagai perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di masa yang akan mendatang.

Selamat Membaca,

REDAKSI

HALAMAN KOSONG

Volume 12, Nomor 3, November 2018

**p-ISSN 1978 - 2292
e-ISSN 2579 - 7425**

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

HALAMAN KOSONG

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Nizar Apriansyah (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights)

Validity of Electronic Registered Certificate of Fiduciary Transfer

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 3, November 2018

This research is aimed to gain scientific depiction related to the implementation of electronic registration of fiduciary transfer of security, while the problems raised here is the validity of the electronically registered certificate of fiduciary transfer and problems encountered following the enactment of the electronic registration of fiduciary transfer of security. The method of this legal study is normative-empirical used by comparing the qualitative and quantitative data employing descriptive analytical analysis, in discussing the theory on the system, electronic system, definition of fiduciary, definition of fiduciary transfer. The analysis of the data under this study concludes that: the electronic Certificate of Fiduciary Transfer registered with the Directorate General of Public Legal Administration under the letter No. AHU-06.0T.03.01 of 2013, in the researcher's opinion has not been valid since it is against the Law No. 42 of 1999 regarding Fiduciary Transfer of Security, President Decree No. 139 of 2000 regarding Establishment of Fiduciary Transfer Registry in Capital of Each Province in the Republic of Indonesia, Law No. 12 of 2011 regarding Establishment of Law and Legislation No. 11 of 2008 Electronic Information and Transaction. There have been two problems discovered in this research which are substantive problems and technical problems. Finally, the research suggests that it is necessary to introduce clear regulations on the electronic registration of fiduciary transfer that are supported with good registration system of fiduciary transfer.

Keywords: *Validity, Registration Certificate of Fiduciary Transfer, Electronically*

Ahmad Jazuli (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights)

Settlement of Application for Patent Registration in Public Service Improvement

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 3, November 2018

Public services quality is one of main indicators of the credibility of good governance. The law No. 25 of 2009 regarding Public Services regulates how a government should provide the best services to the public in particular to the services related to intellectual property with the Directorate General of Intellectual Property, the Ministry of Laws and Human Rights. An integral Intellectual Property Information System that may be easily accessed by the public, is expected to improve the services pursuant to the principles of public services provision, to support the country's development, to advance for public welfare and to increase the number of Intellectual Property registration in Indonesia. However in the implementation, one may find some obstacles both in the central and Regional levels hence some efforts are required to overcome this. The goal of this study is to find out and analyze the applicable procedures of application for patent registration following the enactment of the Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2016 regarding Paten, to analyze the existing obstacles and the implementation of the principles of public services in the process of application for patent registration. The result of the study indicates that the implementation of the Law regarding Paten has not significantly eliminated the problems with the Directorate General of Intellectual Property, the prevailing problems and internal obstacles with the Directorate General of Intellectual Property, including the implementation of principles of public services that has not been good in the patent services to the public.

Keywords: *Intellectual Property, Patent, Public Services*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Aan Aswari (Faculty of Law, University of Muslim Indonesia)

Double Roles of Administrator as a Mediator in a Dispute in an Online Second Cell Phone Transaction

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 3, November 2018

Technology provides a more specific spot for the people in making transactions, so that in its development, its benefit has significantly encouraged more and more users. The increase in the number of online transactions has been followed with the increasing online transaction disputes, in particular, in this case, the one that involves a complicated system of a second hand cell phone, transacted in a more complicated system also, the online system. Such kind of incident has raised an issue related to the settlement of electronically online transaction of a second hand cell phone by the administrator who is also acting as a mediator in satisfying the expectation of the parties, aimed to qualitatively measure the represented goal of the laws in accommodating this legal action. The result of the study that used this socio legal research approach describes: (1) The pattern of dispute settlement of the parties together with online mediator, and (2) consumer satisfaction from the settlement of online transaction dispute. Finally, it is concluded that the rights and obligations that must be exercised and performed still cause some disappointment and even damages to either party due to the role of the administrator who doubles as a online mediator. It is also suggested that the online mediator must pass the establishment and recruitment pursuant to the legal procedures, so that the results will be of professional mediator's, enforceable and will have a force in laws.

Keywords: *Double Rolse, Administrator, Mediator, Transaction, Online*

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights)

Role of Immigration Intelligence in the Anticipation on Potential Vulnerability Led by Foreigners in Indonesia

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 3, November 2018

The purpose of this study is to analyze the role of immigration intelligence in the supervision of foreigners and what steps are taken in anticipating potential vulnerability by foreigners. It is a qualitative approach with secondary data in the form of books, legislation and research journals. The results show that the role of Immigration Intelligence is to do an early detection of any disturbance (potential vulnerability) caused by foreigners, both those who will enter and their activities in Indonesian territory and threaten the stability of the country. Early detection process through various stages, namely processing foreign data (visas and passports) and analyzing in-depth so as to produce accurate and integrated information in the immigration information management system (SIMKIM). Existing information is made in the form of intelligence products originating from information from the public, government agencies, visiting places or buildings that can be found information about the whereabouts and activities of foreigners and conducting intelligence operations. Anticipation steps are taken, namely: first: establishing a foreign reporting system (APOA) involving all elements of society and entertainment, hotel, restaurant associations to report on the existence and activities of foreigners. Second: Establish an intelligence community, namely the State Intelligence Agency, TNI, Polri, and ministries /agencies that hold state and regional intelligence (Kominpus and Kominda) as a forum for exchanging information regarding the presence of foreigners. Third: Cooperating with Interpol (Immigration will have/connected with Interpol data so that data from all countries). Immigration Intelligence also cooperates with the Indonesian National Police by signing the use of application I-24/7 to detect data on lost or stolen passports and fugitives.

Keywords: *Immigration Intelligence, Foreigners, Threats, Interference*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Haryono (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights)

Optimalization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation of Prisoners)

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 3, November 2018

One of the goals of the encouragement in a correctional system is to restore the relationship between the inmates and the people at large. An Open Prison as a place for the encouragement is a strategic unit that is expected to materialize the final goal of the correctional system. The goals of this study are focused on the analysis to the roles of the prison in a correctional system and the optimization process of the performance of duties and functions of an Open Prison by putting the inmates in it. This research is descriptive in nature by using mix method approach. According to the research, an Open Prison is an ideal form of the correctional system's goal in rehabilitating and re-integrating the inmates and the public. The implementation of prisoner placement in the Nusakambangan Class IIB open camp that has entered the assimilation period is not yet in accordance with Minister of Law and Human Rights Regulation Number 3 of 2018 and Circular of the Director General of Corrections Number PAS_PK.01.01.02-100 in 2013. The obstacles to the placement of prisoners to the Nusakambangan Class IIB Open Prisons that are far from the public residential, not many inmates that deserve to be recommended, employees' mind set and the assimilation made in a general correction facility.

Keywords: *Optimization, Open Prison, Prisoners, Assimilation*

Imam Lukito (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights)

The Roles of Regional Government in Promoting Geographical Indications (Studi on the Province of Kepulauan Riau)

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 3, November 2017

The Province of Kepulauan Riau is one of the areas that have no registered geographical indication products. Diversity in its natural resources has gifted Indonesia with geographical indication products, that's why the government needs to adopt a policy to map the products with potential geographical indications. This research analyze the problems related to the roles of Regional Government of Kepulauan Riau in promoting its Potential Geographical Indications and the obstacles in registering the geographical indications in Kepulauan Riau. This research uses qualitative approach, is descriptive analysis in nature. The result of the study conclude that: firstly, the roles of Regional Government in Kepulauan Riau so far has been limited only to list and submit the data of the products with potential to be registered with the Regional Office of the Ministry of Laws and Human Rights in Kepulauan Riau, however there is no follow-up in the form of a research to make a requirement manual; and secondly, the problems in registering the geographical indications is lack of knowledge on the benefit that may be reaped from such geographical indications, lack of awareness and not understanding the obligations in developing the geographical indications as well as natural factors such as mining areas which in turn will bring impacts to the agricultural and plantation products and the area is dominated by waters and seas that may increase the difficulty level in measuring the sea boundaries and climate under the sea surface as variables described in the requirement manual.

Keywords: *Roles, Regional Government, Geographical Indications*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Sudjana (Faculty of Law, University of Padjadjaran)

The Policies of Loan Write-off or Waiver by State-Owned banks within the Perspective of Legal Certainty

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 3, November 2018

This study is aimed to collect information concerning the provisions governing the settlement of non-performing loans by means of loan write-off or loan waiver by a State-Owned Bank. The employed research method is the law approach method (statute approach), in which data are collected by means of literature studies and qualitative normative data analysis techniques. The results of the study show that the provisions for the settlement of non-performing loans by means of write-off or waiver by the State-Owned Bank from the legal substance point of view are contradictive or inconsistent hence the stakeholders have been hesitant in writing off or waiving the loan.

Keywords: *Policies, Loans write-off or Loan Waiver, State-Owned Bank, Legal Certainty*

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Nizar Apriansyah (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan Secara Elektronik

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 3, november 2018

Sejak berlakukannya pendaftaran jaminan fidusia banyak ditemukannya kendala baik teknis maupun substantif, maka penelitian ini mengangkat permasalahan keabsahan jaminan fidusia yang didaftarkan secara elektronik dan kendala-kendala yang dihadapi pasca berlakunya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran ilmiah terkait dengan penerapan secara elektronik pendaftaran jaminan fidusia dengan metode yang digunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan analisa data penelitian ini menyimpulkan bahwa: Sertifikat jaminan fidusia secara elektronik yang didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak sah karena bertentangan dengan: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada dua kendala yang dapat terungkap pada penelitian ini diantaranya kendala substantif, kendala teknis dan terakhir penelitian menyarankan perlu adanya peraturan yang jelas mengenai pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, serta didukung dengan sistem pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia yang baik.

Kata Kunci: Keabsahan, Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Secara Elektronik

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Ahmad Jazuli (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 3, November 2018

Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengatur bagaimana seharusnya pemerintah memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat sehingga mewujudkan pelayanan yang prima khususnya terhadap layanan kekayaan intelektual yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sistem informasi Kekayaan Intelektual yang integral dan mudah diakses oleh masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik, mendukung pembangunan bangsa, memajukan kesejahteraan umum serta meningkatkan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Indonesia, namun dalam tataran implementasinya masih terdapat adanya hambatan-hambatan pelaksanaan pelayanan prima baik di tingkat pusat maupun Kantor Wilayah sehingga diperlukan suatu upaya-upaya untuk mengatasinya. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah implementasi proses permohonan pendaftaran paten yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, hambatan yang ada, dan penerapan prinsip-prinsip layanan publik dalam proses permohonan pendaftaran paten. Hasil dari kajian ini menyatakan bahwa penerapan Undang-Undang tentang Paten tidak secara signifikan mengeliminir permasalahan yang ada di DJKI, dominannya permasalahan dan hambatan internal di DJKI, dan belum terimplementasikannya dengan baik prinsip-prinsip layanan publik terhadap layanan paten bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Paten, Pelayanan Publik

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Aan Aswari (Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia)

Peran Ganda Administrator sebagai Mediator dalam Sengketa Transaksi Ponsel Bekas Secara Online

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 3, November 2018

Teknologi transaksi ikut menyediakan sebuah tempat yang spesifik bagi para pihak untuk melakukan transaksi, sehingga dalam perkembangan pemanfaatannya mendorong signifikan pengguna yang terbukti semakin meningkat. Peningkatan bertransaksi online diikuti dengan pertumbuhan sengketa transaksi online, khusus dalam kajian ini menggambarkan sebuah sistem rumit pada sebuah telepon selular bekas, yang ditransaksikan dalam sebuah sistem yang rumit pula, yaitu secara online. Fenomena tersebut menghadirkan permasalahan terkait penyelesaian sengketa transaksi elektronik telepon seluler bekas secara online oleh administrator yang juga berperan sebagai mediator dapat memenuhi eskpektasi kepuasan para pihak, yang bertujuan untuk mengukur secara kualitatif terkait representasi tujuan hukum mengakomodir perbuatan hukum ini. Hasil penelitian yang menggunakan pendekatan socio legal research ini, mendeskripsikan tentang: (1) Pola penyelesaian sengketa para pihak bersama mediator online, dan (2) Kepuasan konsumen yang diperoleh dari penyelesaian sengketa transaksi online. Akhirnya disimpulkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan masih menimbulkan rasa kecewa bahkan kerugian bagi salah satu pihak akibat peran ganda administrator sekaligus mediator online, disarankan agar mediator online melewati proses pembentukan dan rekrutmen sesuai dengan prosedur hukum, sehingga hasil yang dilahirkan oleh mediator profesional dapat melahirkan hukum yang harus dilaksanakan serta memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci: Peran Ganda, Administrator, Mediator, Transaksi, Online

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Peran Intelijen Keimigrasian dalam Rangka Antisipasi terhadap Potensi Kerawanan yang ditimbulkan oleh Orang Asing di Wilayah Indonesia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 3, November 2018

Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis peran intelijen imigrasi dalam pengawasan orang asing dan langkah apa saja yang dilakukan dalam mengantisipasi potensi kerawanan oleh orang asing. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran Intelijen Keimigrasian melakukan deteksi dini terhadap setiap gangguan (potensi kerawanan) yang mungkin ditimbulkan oleh orang asing, baik yang akan masuk maupun orang asing yang berada dan berkegiatan di wilayah Indonesia serta mengancam stabilitas negara. Proses deteksi dini melalui berbagai tahap yaitu pengolahan data orang asing (visa dan paspor) dan menganalisis secara mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam sistem manajemen informasi keimigrasian (SIMKIM). Informasi yang ada dibuat dalam bentuk produk intelijen yang berasal dari keterangan masyarakat, instansi pemerintah, mendatangi tempat atau bangunan yang dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing serta melakukan operasi intelijen. Langkah antisipasi yang dilakukan yaitu: pertama: membangun sistem pelaporan orang asing (APOA) dengan melibatkan semua unsur masyarakat dan asosiasi hiburan, hotel, restoran untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing. Kedua: Membentuk komunitas intelijen yaitu Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, dan kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan intelijen negara baik pusat dan daerah (Kominpus dan Kominda) sebagai wadah tukar menukar informasi terkait keberadaan orang asing. Ketiga: Bekerjasama dengan Interpol (Imigrasi akan memiliki /tersambung dengan data interpol sehingga data-data dari seluruh negara). Intelijen Kemigrasian (Imigrasi) juga bekerjasama dengan POLRI dengan menandatangani penggunaan aplikasi I-24/7 berfungsi mendeteksi data-data pemegang paspor yang hilang atau dicuri maupun buron yang dicari suatu negara.

Kata Kunci: Intelijen Imigrasi, Orang Asing, Ancaman, Gangguan

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Haryono (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 3, November 2018

Salah satu tujuan pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan antara narapidana dan masyarakat. Lapas Terbuka merupakan unit strategis dalam rangka mempersiapkan narapidana melaksanakan proses reintegrasi sosial yang berdasarkan konsep community-based correction. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi penempatan narapidana di Lapas Terbuka serta hambatan penempatan narapidana di Lapas Terbuka Nusakambangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan mix method. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Lapas Terbuka melaksanakan pembinaan narapidana tahap lanjutan dalam bentuk asimilasi. Pelaksanaan penempatan narapidana di Lapas Terbuka Klas IIB Nusakambangan yang sudah memasuki masa asimilasi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS_PK.01.01.02-100 Tahun 2013. Hambatan penempatan narapidana ke Lapas Terbuka Klas IIB Nusakambangan disebabkan antara lain karena kurangnya minat Narapidana, tingginya narapidana khusus, mind set pegawai serta asimilasi juga dilakukan di Lapas umum.

Kata Kunci: Optimalisasi, Lapas Terbuka, Narapidana, Asimilasi

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Imam Lukito (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 3, November 2018

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang belum memiliki produk indikasi geografis terdaftar. Keanekaragaman alam Indonesia memberikan kekayaan produk indikasi geografis, oleh karena itu pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk memetakan produk-produk yang berpotensi indikasi geografis. Penelitian ini menganalisa permasalahan terkait peran Pemerintah Daerah Kepulauan Riau dalam mendorong potensi indikasi geografis dan kendala dalam pendaftaran indikasi geografis di Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, peran pemerintah daerah di Kepulauan Riau sejauh ini masih terbatas pada menginventarisir dan menyampaikan data-data produk yang memiliki potensi untuk didaftarkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, namun belum ada tindak lanjut untuk melakukan penelitian untuk membuat buku persyaratan; dan kedua, kendala dalam pendaftaran indikasi geografis adalah ketidaktahuan manfaat yang diperoleh dari indikasi geografis, kurangnya kesadaran dan ketidakpahaman akan kewajiban membangun indikasi geografis serta faktor alam seperti daerah pertambangan yang berimbas pada hasil pertanian dan perkebunan serta dominasi wilayah perairan dan laut yang menyebabkan tingkat kesulitan dalam mengukur batas wilayah laut dan iklim di bawah perairan laut sebagai variabel yang dideskripsikan dalam buku persyaratan.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Indikasi Geografis

Sudjana (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)

Kebijakan Kredit yang Dihapusbukukan atau Dihapus Tagih oleh Bank BUMN dalam Perspektif Kepastian Hukum

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 3, November 2018

Kajian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang ketentuan yang mengatur penyelesaian kredit bermasalah yang dihapusbukukan atau dihapus tagih oleh Bank Badan Usaha Milik Negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (statuta approach), metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan teknik analisa data normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Ketentuan Penyelesaian kredit bermasalah yang dihapusbukukan atau dihapus tagih oleh Bank Badan Usaha Milik Negara dari sisi substansi hukum kontradiksi atau inkonsisten sehingga pemangku kepentingan ragu-ragu dalam melaksanakan hapus buku atau hapus tagih tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan, Kredit yang dihapusbukukan atau hapus tagih, Bank BUMN, Kepastian Hukum